

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman dari jurnal peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh penulis yaitu efektifitas pelaporan menggunakan program elektronik filing. Penelitian terdahulu Risal (2013) pada jurnal tersebut tujuan peneliti yaitu untuk menguji pengaplikasian *Technology Acceptance Model* (TAM) pada system E-filing. Dari hasil penelitiannya menunjukkan persepsi kegunaan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan E-filing dan persepsi kemudahan secara signifikan.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Ivana (2013) Penelitian tersebut membahas dan mengkaji tentang “Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan e-filing”. Penelitian ini dilakukan di Kota Kediri. Dalam peneliti juga menyimpulkan bahwa persepsi terhadap Kegunaan, Kemudahan, Kesukarelaan, Faktor Sosial sangat berpengaruh terhadap minat Wajib Pajak dalam menggunakan system elektronik filing (E-filing)

Penelitian sejenis dilakukan oleh Rahayu (2009). Penelitian tersebut membahas dan mengkaji tentang “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan penggunaan teknologi internet oleh masyarakat guna memperoleh kemudahan transaksi perpajakannya masih rendah. Masih banyak Wajib Pajak yang terlambat dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terhutangnya. Oleh karena itu dikemudian hari perlu dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi internet guna mempermudah transaksi perpajakannya.

B. Teori Dasar-Dasar Perpajakan

1. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli :

Menurut Andriani (2015) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Smeets (2010) Pajak-pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontra prestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara.

Menurut Soemitro (2012). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari berbagai definisi diatas, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iurann yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a) Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara (pemerintah pusat dan daerah).

- b) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23 A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-undang”. Artinya pemungutan pajak wajib untuk didasari oleh Undang-undang dan juga aturan turunannya.
- c) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak menurut Pudyatmoko (2009:22) yaitu “Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif ialah syarat yang berkenaan dengan sasaran pajak atau objek pajak. Sedangkan syarat subjektif ialah syarat yang berkenaan dengan subjek pajak”.

3. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :

a) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak (insentif pajak). Dalam rangka melindungi dan meningkatkan konsumsi atas barang/jasa produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

4. Manfaat Pajak

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) diatas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan, sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Manfaat uang pajak adalah sebagai berikut :

a) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara

Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak. Pengeluaran rutin seperti, belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan dan sebagainya biayanya berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan pengeluaran pembangunan bersumber dari tabungan pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut setiap tahun harus meningkat sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Penerimaan

dalam negeri terdiri dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas sebagian besar merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak.

b) Pajak merupakan salah satu alat pemerataan

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti untuk sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana perhubungan, sarana pertahanan/keamanan dan sebagainya. Peranan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan ini sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial, seperti tercantum dalam Trilogi Pembangunan.

c) Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi

Sebagaimana telah disebutkan dalam fungsi pajak budgeter, apabila masih ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai sebagai tabungan pemerintah.

5. Penggolongan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut :

a) Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak langsung (jadi langsung dikenakan pada subyeknya). Dimulai dengan menetapkan orang atau badan sebagai wajib pajak, baru kemudian ditentukan syarat-syarat obyektifnya.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subyeknya. Dimulai dengan obyeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dll. baru kemudian ditentukan orang atau badan yang harus membayar pajaknya (subyeknya).

b) Menurut Pembebanannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik).

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak

bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain serta pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Meterai.

c) Menurut Kewenangannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan (PBB P3).

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2).

6. Tarif Pajak

Secara structural menurut tarif pajak tergolong dalam empat jenis yaitu:

- a) Tarif Proporsional (*a proportional tax rate structure*) adalah tarif pajak yang pengenaannya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b) Tarif Regresif / tetap (*a regressive tax rate structure*) merupakan tarif pajak yang akan selalu tetap jika sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
- c) Tarif Progresif (*a progressive tax structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- d) Tarif Degresif (*a degressive tax rate structure*) adalah kenaikan persentase atau pengenaan tarif pajak akan semakin meningkat.

Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia adalah tarif progresif yang telah diatur pada Pasal 17 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

7. Pajak Penghasilan

a) Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenakan pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang pajak

penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak.

Karena Undang-Undang pajak penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari obyek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

b) Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang

pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

c) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang biasa disebut sebagai Wajib Pajak yang telah / sedang menerima penghasilan . Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 merupakan :

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah

- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- 5) Mantan pegawai
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
- a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya
 - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja

- c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
- d. peserta pendidikan dan pelatihan
- e. peserta kegiatan lainnya

d) Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibyarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau

penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun

- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

8. Surat Setoran Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Fungsi SSP yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

SSP digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) SSP Standar

SSP Standar merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerimaan Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran.

b) SSP Khusus

SSP Khusus yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak oleh Wajib Pajak terutang ke Kantor Penerimaan Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerimaan Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi yang berisi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Ditjen Pajak yang pada dasarnya dalam hal ini memiliki fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan.

9. Surat Pemberitahuan (SPT)

a) Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara garis besar Surat Pemberitahuan (SPT) dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) dan juga dokumen elektronik. Surat Pemberitahuan juga dibedakan menjadi dua, yaitu :

- i. Surat Pemberitahuan Masa, yaitu surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan kegiatan perpajakannya dalam satu masa pajak (bulan).
- ii. Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu surat pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan kegiatan perpajakannya dalam satu Tahun Pajak .

b) Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- 3) Harta dan kewajiban
- 4) Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan

Sedangkan bagi pemotong/ pemungut pajak SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

c) Jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP)

Jenis SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis, diantaranya yaitu :

i. SPT PPh OP 1770 SS

Jenis SPT ini merupakan SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dalam satu tahun.

ii. SPT PPh OP 1770 S

Jenis SPT ini merupakan SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dalam satu tahun.

iii. SPT Tahunan PPh OP 1770

Jenis SPT ini merupakan SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final, dan/atau da lengllam negeri lainnya/luar negeri.

d) Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

1) Prosedur Penyelesaian SPT

- a. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
- b. Setiap Wajib Pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

- d. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- e. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain :
 - i. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - ii. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - iii. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan : Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2) Penyampaian SPT Elektronik (e-filing)

e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP).

Penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik atau *E-Filing*, merupakan terobosan yang diberikan dan diupayakan

oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kegiatan perpajakannya. Wajib Pajak dapat SPT Tahunan secara elektronik (*E-Filling*) melalui perusahaan ASP yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik (*E-Filling*), maka Wajib Pajak wajib menyampaikan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), SPT yang menunjukkan bahwa SPT tersebut telah memuat tanda tangan serta Surat Setoran Pajak (bila ada) ke Kantor Pelayanan Pajak setempat atau tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung, paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik.

Penyampaian SPT Tahunan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu. Jika SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik jatuh pada akhir batas waktu, dan jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPT Tahunan tersebut dianggap disampaikan tepat waktu.

3) Pembetulan SPT

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal

Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

4) Batas Waktu Penyampaian SPT

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

5) Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan

penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan Wajib Pajak Badan.
- d. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tinda pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

10. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut *Compliance Model OECD Center for Tax Policy and Administration*(2004:38) Tingkat kepatuhan dalam bidang perpajakan dibagi menjadi 5 (lima) kategori Wajib Pajak. Berikut merupakan beberapa tingkatan yang pada umumnya dapat menunjukkan tingkat kepatuhan pajak dari Wajib Pajak tersebut. Pada tingkat yang paling baik adalah ketika wajib pajak sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, dengan demikian sebagai strategi upaya untuk terus meningkatkan serta untuk terus memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik pada kegiatan perpajakan.

Pada tingkat kepatuhan pajak yang selanjutnya adalah dimana Wajib Pajak yang ingin selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk menghindari pajak, meskipun hasilnya adalah kegagalan. Keputusan wajib pajak untuk menghindari kegiatan perpajakan dapat berakibat melanggar aturan pajak.

Tingkat kepatuhan pajak dimana Wajib Pajak tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya atau dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh, yaitu tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak selalu memiliki usaha serta upaya untuk selalu menghindar memenuhi kewajibannya dengan berbagai alasan. Dengan demikian perbedaan perlakuan pajak akan terus dirasakan

oleh Wajib Pajak beserta ketidakadilan aturan, serta prosedur administrasi pelaporan pajak.

Tingkat kepatuhan yang terakhir merupakan Wajib Pajak yang tergolong padatingkatan yang sama skali tidak bersedia atau enggan memenuhi kewajibannya atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya selama ini.

11. Efektivitas sistem

Menurut McLeod dalam Susanto (2007:41), efektivitas sistem artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga mudah dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan”.

Efektivitas sistem dapat diukur dengan menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi menurut Bodnar dalam Anggraini (2009:30) adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi ilegal access dan kerusakan pada sistem. Aspek keamanan data diukur melalui kemampuan sistem dalam

mengantisipasi kerusakan fasilitas pemrosesan data oleh daya listrik yang mati tiba-tiba, kemampuan sistem dalam mengantisipasi kerusakan akibat virus, kemampuan sistem dalam mengantisipasi akibat kesalahan memencet tombol yang tidak disengaja, kemampuan sistem dalam mengantisipasi akses karyawan dan pihak luar yang tidak berkepentingan terhadap data, kemampuan sistem dalam mengantisipasi keamanan data akibat tranfer data jarak jauh dan kemampuan sistem dalam mengantisipasi keamanan data back up atas kerusakan hardware dan software.

- 2) Indikator waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentan waktu yang telah ditentukan. Aspek waktu dapat diukur melalui kecepatan dalam melakukan input atau memasukkan data, kecepatan dalam melakukan pencarian data yang diperlukan, kecepatan dalam melakukan analisis dan proses data, kecepatan dalam melakukan pelayanan terhadap customer, kecepatan dalam penyajian data apabila sewaktu-waktu diperlukan, kecepatan dalam menjalankan perintah, kecepatan dalam mengirim dan menerima informasi yang diperlukan.
- 3) Indikator ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume dan data yang besar

biasannya terdapat dua jenis kesalahan yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. Aspek ketelitian data diukur melalui ketelitian dalam memasukkan data, ketelitian dalam perhitungan angka baik sederhana maupun rumit, ketelitian dalam penanganan transaksi, ketelitian dalam pencarian data yang diperlukan, ketelitian dalam memberikan penyajian informasi, ketelitian dalam prosedur-prosedur untuk koreksi, ketelitian dalam proses analisis, ketelitian dalam proses transfer data jarak jauh.

- 4) Indikator variasi laporan atau output berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini, tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna sistem informasi.
- 5) Indikator relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan. Aspek relevansi diukur melalui relevansi dalam hal pencatatan data, relevansi dalam hal analisis data, relevansi dalam hal penyajian data, relevansi dalam hal pengolahan dan penyimpanan data, relevansi dalam hal pelayanan terhadap customer dan relevansi dalam hal pencapaian target.